

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya)

SKRIPSI

AKUNTANSI



OLEH:

ANISIA KRISTANTI MANEHAT

NIM : 2019110054

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2023

RINGKASAN

Dalam penelitian ini, Kantor SAMSAT Manyar Kota Surabaya akan dikaji untuk mengetahui pengaruh manfaat dari kesadaran biaya dan tanggung jawab bantuan publik terhadap partisipasi warga dalam penggunaan kendaraan mekanis.

Jenis ini bersifat instruktif kuantitatif. Materi yang digunakan dalam tes ini adalah pengetahuan krusial. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari 60 responden dengan menggunakan strategi inspeksi dan pendekatan pengujian tidak teratur, populasi 150 kendaraan bermesin yang rentan terhadap beban terdiri dari kendaraan bermesin. Mendistribusikan survei membantu dalam pengumpulan informasi. Berbagai investigasi relaps langsung digunakan dalam penilaian.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa Konsistensi Warga Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Manyar Kota Surabaya dipengaruhi secara signifikan oleh Pengeluaran Perhatian dan Tanggung Jawab Bantuan Publik.

Kata Kunci: kesadaran, Akuntabilitas, Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban yang dimiliki warga negara terhadap negara yang harus dibayar oleh entitas yang dipaksa oleh undang-undang, dengan menunda penyelesaian suatu pelanggaran, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya manfaat rakyat. Sumber utama penerimaan dalam negeri dalam APBD adalah retribusi. Biaya Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan salah satu bentuk penerimaan iuran lingkungan. Biaya Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang harus dibayar oleh negara daerah karena sesuai dengan Undang-undang Tidak Resmi Nomor 65 Tahun 2001, yaitu pajak atas kepemilikan dan pengurusan kendaraan mekanis. Lebih tepatnya, otoritas publik harus mengubah kerangka pemilihan tugas dari kerangka penilaian otoritas menjadi kerangka penilaian diri, yang telah ada sejak kerangka perubahan tugas tahun 1983 dan berdampak signifikan pada warga negara dengan mengizinkan mereka membayar, menghitung, dan melaporkan berapa biaya yang harus dibayar tanpa bantuan orang lain. Dimulai dengan modifikasi pengeluaran secara menyeluruh pada tahun 1983, otoritas publik mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pemungutan pajak. Sejak saat itu, Indonesia menerapkan struktur penilaian otoritas. Ini akan efektif untuk menerapkan kerangka evaluasi diri jika persyaratan konsistensi eksplisit dalam pandangan publik telah ditetapkan.

Kompensasi teritorial yang diterima oleh suatu negara yang sumber pendapatan utamanya adalah perpajakan. Pungutan memiliki kekuatan untuk dibelanjakan, terutama ketika disimpan di kas negara dan dicairkan untuk mendanai pengeluaran negara seperti operasi pemerintah daerah dan tujuan perbaikan. Sasaran bea akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan penggunaan negara karena perbaikan yang dilakukan akan membutuhkan sumber daya yang paling besar, sehingga otoritas publik harus meningkatkan pendapatan penyimpanan negara secara internal.

UU no. 28 Tahun 2009, yang terdiri dari penilaian wilayah dan retribusi, dapat memberikan kesempatan kepada setiap kabupaten untuk lebih mendorong kesepakatan tentang apa yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada DPRD dalam memikul tanggung jawab dan tugas kewilayahan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang ditujukan kepada pemerintah daerah terdekat, terutama yang diperoleh melalui penilaian daerah, khususnya Biaya Kendaraan Bermotor (PKB). Pungutan retribusi kendaraan bermotor merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah, meskipun setiap kabupaten diperbolehkan memungutnya karena untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di setiap lokasi. Pengumpulan informasi awal sangat dipengaruhi oleh beban di daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi. Struktur biaya pemrosesan, manajemen pemerintah daerah, tarif yang dikenakan, dan penegakan hukum semuanya memiliki pengaruh pada konsistensi warga.

Administrasi publik dapat memenuhi kewajibannya dan terus maju dalam bidang administrasi publik di Kantor Samsat Surabaya Selatan dengan menggunakan strategi yang memberikan bantuan terbaik. Dengan relatif banyaknya pelanggan yang menggunakan kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Selatan, maka pendapatan PKB (biaya kendaraan bermotor) dapat meningkat. E-Sakpole, layanan mutakhir yang dibuat di siang bolong oleh Samsat, merupakan tagihan kendaraan berbasis web yang harus dapat diakses dari mana saja yang menerima kartu kredit. Pejabat dapat diyakinkan dengan bantuan besar, yang akan menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan serta konsistensi WP.

Wajar jika memiliki pilihan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berkualitas karena Kantor Bersama Samsat Kota Surabaya merupakan tempat para tukang kendaraan bermotor yang bermacam-macam dilakukan sebagai Kantor Perwakilan (UPTD) yang membayar cicilan biaya kendaraan bermotor. Besar kecilnya pendapatan belanja suatu kabupaten harus terlihat dari perekonomian daerahnya. Upah rakyat semakin meningkat semakin makmur ekonominya. Ini memiliki efek yang menguntungkan pada kemampuan orang untuk membayar hutang mereka. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika tingkat konsistensi warga masih sangat rendah. Akibatnya, kesadaran dan konsistensi warga harus diharapkan untuk memastikan bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan, jelas, bahwa wilayah tersebut lebih produktif (Lestari, 2016). Perhatian terhadap pungutan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsistensi warga. Berbeda dengan pemungutan pajak, yang merupakan perhatian tanggung jawab, perhatian

adalah keadaan mengetahui atau memahami. Mengingat hal ini, perhatian kewajiban adalah kebutuhan untuk mengetahui atau memahami masalah tugas. Masyarakat umum akan setuju dengan sumpah otoritas publik untuk menjunjung tinggi dakwaan jika mereka mendapat umpan balik yang baik dari warga daerah setempat tentang pelaksanaan kemampuan negara oleh otoritas publik (Priambodo, 2017). Retribusi kendaraan bermotor merupakan salah satu aspek tanggung jawab teritorial yang sangat menekankan pada peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Lestari (2016), pengembangan wilayah setiap lokasi atau kota dibantu oleh cadangan yang diperoleh dari tol kendaraan otomatis. Akibatnya, variasi pendapatan pengeluaran harus dimajukan sebanyak yang wajar. Meningkatnya jumlah kendaraan mekanis saat ini harus membuat sejumlah besar tujuan kendaraan mekanis menjadi jelas.

Agar individu dapat memahami aturan dan taktik muatan dengan cara terbaik, sosialisasi muatan memainkan peran penting dalam memberikan informasi. Warga akan belajar melalui sosialisasi biaya betapa pentingnya untuk memenuhi komitmen mereka. Karena opsi ini akan membuat pengalaman WP dengan biaya kendaraan mesin lebih mudah diakses, kepatuhan WP akan meningkat karena semakin banyak WP berafiliasi dengan otoritas publik.

Administrasi publik yang dilakukan oleh wakil-wakil pejabat administrasi daerah harus menghadirkan kesan terhormat dan berwatak baik sehingga menghasilkan aib yang terhormat menurut daerah setempat. Pejabat harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jaringan yang puas dengan layanan

yang diberikan oleh pejabat akan percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil sehubungan dengan uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

1.1 Rumusan Masalah

Topik-topik berikut dibahas dalam karya ini, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah tersebut di atas:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran pajak?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bergantung pada akuntabilitas pelayanan publik?
3. Apakah penggunaan kendaraan bermotor dan kepatuhan akuntabilitas pelayanan publik dengan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak berdampak?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan apakah kesadaran muatan berdampak signifikan terhadap keteguhan muatan mesin kendaraan.
2. Untuk mengetahui apakah konsistensi tarif kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kewajiban bantuan masyarakat.

3. Mengevaluasi tanggung jawab administrasi publik yang mempengaruhi konsistensi warga negara dan konsistensi kesadaran warga negara.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini guna melengkapi Tugas Akhir (Skripsi) dan sebagai bahan untuk memperluas wawasan, pengalaman, serta pengetahuan penelitian dalam meneliti masalah yang ada serta memperoleh gambaran langsung tentang wajib pajak.

1.3.2 Bagi Universitas

Yaitu untuk bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai hal perpajakan, serta dapat memperoleh manfaat dari pengalaman penelitian sebelumnya dan dapat digunakan sebagai acuan perbandingan bagi penelitian kedepannya.

1.3.3 Bagi Samsat

Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsistensi warga, yang dalam penelitian ini meliputi kesadaran warga, konsistensi warga, dan kewajiban bantuan publik, dan sebagai komitmen untuk meningkatkan konsistensi warga, khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsila, S. D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Surabaya Timur.
- Aswati, Wa Ode, Arifudin Mas'ud, and Tuti Nurdianti Nudi. (2018). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan III*:27-39.
- Dharma, G. P., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Publik Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana*, 340-353.
- Fokusmedia. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (VI11)*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manyar Surabaya Timur. *PERMANA*, 20-36.
- I Made Wahyu Cahyadi, I Ketut Jati, 2016. Pengaruh Kesadaran, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Manyar Kota Surabaya Timur). *Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*, 7.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muchidin, D. S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Manyar Surabaya Timur)

- Priabodo, Putut (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak. Universitas Negeri Yogyakarta. Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Purnomo, A. (2020, Februari Jumat). *Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah*. (A. Maulana, Editor) Retrieved Februari Jumat, 2020, from KOMPAS.com:www.kompas.com
- Rahayu, Siti Kurnia. (2009). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta:Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh*. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supadmi. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis. Universitas Udayana*.
- Susanti, N. A. (2018). Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 345-357.
- Syah, A. L., & Krisdayawati. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta:Rajawali.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Tingkat Pendidikan Nasional.

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 106-116.